

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Riau

Msy. Nurazania Fazria^{1*}, Rita Martini², Sarikadarwati³

^{1,2,3} Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Sriwijaya Negara, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.

Email: mnurazaniaf@gmail.com^{1*}, ritamartini@polsri.ac.id², sarikadarwati@polsri.ac.id³

Histori Artikel:

Dikirim 11 Agustus 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 Desember 2025; Diterima 20 Februari 2026; Diterbitkan 1 April 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Fazria, M. N., Martini, R., & Sarikadarwati, S. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Riau. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 12(2), 1045-1055. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i2.5305>.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Riau. Studi ini mengambil sampel dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi tersebut selama periode 2021 hingga 2023. Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (www.bpk.go.id), serta dianalisis dengan metode regresi data panel menggunakan software Eviews versi 12. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yakni PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Secara individu, Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah. Sebaliknya, Dana Perimbangan menunjukkan korelasi negatif terhadap tingkat kemandirian tersebut. Adapun Belanja Modal, berdasarkan analisis parsial, tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Riau.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Belanja Modal; Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Abstract

This study was conducted with the aim of analyzing how Regional Original Revenue (PAD), Balancing Funds, and Capital Expenditure affect the Level of Regional Financial Independence in Riau Province. This study takes a sample of 12 regencies/cities in the province over the period 2021 to 2023. Using a quantitative approach, this study relies on secondary data obtained through the official website of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (www.bpk.go.id), and analyzed using the panel data regression method using Eviews software version 12. The results of data processing show that the three independent variables - namely PAD, Balance Fund, and Capital Expenditure - simultaneously have a significant influence on the level of financial independence of local governments. Individually, Local Owned Revenue contributes positively to the increase in local fiscal independence. In contrast, the Balancing Fund shows a negative correlation with the level of independence. As for Capital Expenditure, based on partial analysis, it does not show a significant impact on the level of regional financial independence in Riau Province.

Keyword: Regional Original Revenue; Balance Fund; Capital Expenditure; Level of Regional Financial Independence.

1. Pendahuluan

Penerapan otonomi daerah merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan layanan publik melalui mekanisme desentralisasi keuangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, setiap daerah diberikan hak untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri, dengan berlandaskan prinsip otonomi serta pelimpahan tugas dari pusat. Dalam kerangka tersebut, kemandirian fiskal daerah menjadi tolok ukur utama untuk menilai seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam mendanai kebutuhannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pusat. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk menilai tingkat otonomi fiskal adalah perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total penerimaan daerah. Selain PAD, komponen Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) turut berperan dalam membentuk kapasitas keuangan daerah. Tak kalah pentingnya, Belanja Modal menjadi instrumen belanja yang digunakan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur dan mendorong produktivitas ekonomi jangka panjang. Dalam hal ini, Provinsi Riau menjadi wilayah yang menarik untuk dianalisis. Walaupun dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam dan memiliki potensi ekonomi besar, tingkat kemandirian fiskalnya tergolong rendah. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah di wilayah kabupaten/kota di Riau masih berada di bawah 25%, yang menunjukkan dominasi peran pemerintah pusat dalam pembiayaan daerah. Bahkan, pada tahun 2025, Riau mengalami defisit anggaran terbesarnya, yang terjadi akibat berkurangnya transfer dari pusat serta belum maksimalnya pendapatan asli daerah yang dihimpun.

Berbagai studi sebelumnya memberikan hasil yang tidak selalu konsisten terkait hubungan antara PAD, Dana Perimbangan, serta Belanja Modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Utami dan Narastri (2025) menyimpulkan bahwa PAD dan belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap otonomi fiskal, namun belanja modal tidak. Di sisi lain, Bella dkk. (2022) menunjukkan bahwa PAD dan belanja modal berdampak positif dan signifikan, sedangkan DAU tidak berpengaruh secara statistik. Sebaliknya, riset Machfud dkk. (2020) menyatakan bahwa dana perimbangan justru memiliki dampak negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, menurut Arpani dan Halmawati (2020), dana perimbangan bisa berdampak positif selama PAD yang diperoleh daerah lebih besar dibandingkan transfer dari pusat. Ketidakepahamanan dalam hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi, khususnya untuk konteks Provinsi Riau. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara empiris hubungan antara PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah selama periode 2021 hingga 2023. Harapannya, temuan studi ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga memberikan masukan konkret dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

2. Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara konsisten memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, karena PAD mencerminkan kemampuan daerah menghasilkan penerimaan sendiri sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber eksternal. Misalnya, Maharani (2025) pada kabupaten/kota Provinsi Aceh serta Fadhila dan Susilowati (2025) pada pemerintah provinsi di Indonesia menemukan bahwa peningkatan PAD secara signifikan memperkuat rasio kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi lokal seperti pajak dan retribusi daerah. Sebaliknya, Dana Perimbangan sering kali menimbulkan efek negatif, sebagaimana dibuktikan Machfud dkk. (2020) pada Provinsi Aceh dan Fadhila serta Susilowati (2025) secara nasional, di mana alokasi transfer yang besar cenderung melemahkan insentif daerah untuk menggali sumber penerimaan mandiri dan justru mempertahankan ketergantungan struktural pada pemerintah pusat. Mengenai Belanja Modal, hasil penelitian masih beragam: beberapa studi seperti Rahmawati (2024) pada

RESEARCH ARTICLE

Provinsi Jawa Tengah serta Maharani (2025) menunjukkan pengaruh positif karena investasi infrastruktur diharapkan menciptakan multiplier effect yang mendongkrak basis PAD jangka panjang, tetapi temuan lain termasuk Desanty (2025) dan berbagai analisis pada daerah tertentu—menyatakan bahwa belanja modal tidak selalu signifikan memengaruhi kemandirian, sering karena implementasi yang kurang efektif, horizon waktu dampak yang panjang, atau alokasi yang belum sepenuhnya produktif. Secara keseluruhan, interaksi ketiga variabel ini menegaskan perlunya pendekatan terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana penguatan PAD menjadi prioritas utama sementara ketergantungan pada dana perimbangan perlu dikurangi dan belanja modal diarahkan agar lebih langsung mendukung pertumbuhan penerimaan lokal.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal guna menganalisis “pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau selama periode 2021–2023,” yang bersumber pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari BPK RI. Penelitian ini menguji menggunakan regresi data panel dengan *software EViews 12*. Untuk menentukan model panel terbaik diperlukan pengujian seperti Uji *Chow*, Uji *Hausman*, serta Uji *Lagrange Multiplier*. Sebelum diadakan analisis regresi, terlebih dahulu dilaksanakan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi), bersama dengan uji R^2 , uji *F*, serta uji *t*, guna mengkaji dampak dari setiap variabel independen, baik secara bersamaan maupun secara terpisah.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	13.83778	11.35026	12.11389	11.43510
Median	10.57500	11.28560	12.11337	11.43532
Maximum	33.86000	11.94953	12.56148	12.04521
Minimum	6.580000	10.94403	11.86198	11.01737
Std. Dev.	8.688589	0.288207	0.161689	0.232155
Skewness	1.341175	0.614761	0.767223	0.511365
Kurtosis	3.203204	2.343617	3.767699	3.490832
Jarque-Bera	10.85444	2.913844	4.415828	1.930339
Probability	0.004395	0.232952	0.109930	0.380919
Sum	498.1600	408.6092	436.1001	411.6635
Sum Sq. Dev.	2642.205	2.907205	0.915016	1.886363
Observations	36	36	36	36

Melalui hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 1, diketahui bahwa terdapat 36 data observasi yang dianalisis, mencakup 12 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau selama tiga tahun, yaitu dari 2021 hingga 2023. Pada variabel *Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*, nilai paling rendah tercatat sebesar 6,58 dan yang tertinggi mencapai 33,86. Rata-rata nilai kemandirian fiskal selama periode tersebut adalah 13,84 dengan penyimpangan standar sebesar 8,69, mencerminkan variasi yang cukup besar antar daerah. Sementara itu, variabel independen pertama yakni *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, memiliki nilai

RESEARCH ARTICLE

minimum sebesar 10,94 dan maksimum 11,95. Secara keseluruhan, PAD mencatat rata-rata sebesar 11,35 dan standar deviasi sebesar 0,29, yang menunjukkan bahwa perbedaan PAD antar daerah relatif kecil selama periode pengamatan. Selanjutnya, variabel kedua yaitu *Dana Perimbangan*, yang terdiri dari komponen transfer fiskal dari pemerintah pusat, memperlihatkan nilai minimum 11,86 dan maksimum 12,56. Rerata dana yang diterima oleh daerah-daerah tersebut berada di angka 12,11, dengan deviasi standar yang tergolong rendah yakni 0,16, menandakan bahwa distribusi dana perimbangan cukup seragam di seluruh wilayah. Variabel ketiga, yaitu *Belanja Modal*, menunjukkan penyebaran nilai yang sedikit lebih besar dibandingkan Dana Perimbangan. Angka terendah tercatat 11,02 dan tertinggi 12,05, dengan rata-rata belanja selama periode kajian sebesar 11,44. Standar deviasi sebesar 0,23 memperlihatkan adanya variasi pengeluaran modal antar kabupaten/kota, meskipun masih dalam rentang yang cukup terkendali.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.581687	(11,21)	0.0297
Cross-section Chi-square	30.794352	11	0.0012

Temuan uji *Chow* mengindikasikan nilai probabilitas F cross-section 0.0297, yang berada di bawah ambang batas signifikansi 0.05. Sehingga, model yang paling layak digunakan untuk estimasi regresi adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq.Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.443908	3	0.3281

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa probabilitas dari random cross-section sebesar 0,3281, yang berada di atas ambang signifikansi 5%. Dengan demikian, menurut Uji Hausman, pendekatan yang paling sesuai adalah Random Effect Model (REM). Namun, ketika membandingkan dengan hasil Uji Chow yang justru mengarah pada pemilihan Fixed Effect Model (FEM), terlihat adanya ketidaksesuaian antara kedua metode uji tersebut. Karena kedua uji menghasilkan simpulan yang berbeda mengenai model estimasi terbaik, maka diperlukan tahapan uji tambahan. Dalam hal ini, Lagrange Multiplier Test (Uji LM) perlu dilakukan untuk menentukan secara lebih meyakinkan model mana yang paling tepat digunakan dalam analisis data panel ini, serta untuk memperoleh hasil estimasi yang optimal dan akurat.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2.213070 (0.1368)	0.047141 (0.8281)	2.260211 (0.1327)
Honda	1.487639 (0.0684)	-0.217120 (0.5859)	0.898393 (0.1845)
King-Wu	1.487639 (0.0684)	-0.217120 (0.5859)	0.383779 (0.3506)
Standardized Honda	2.197287 (0.0140)	0.166574 (0.4339)	-1.760683 (0.9609)
Standardized King-Wu	2.197287 (0.0140)	0.166574 (0.4339)	-1.711724 (0.9565)
Gourieroux, et al.	--	--	2.213070 (0.1511)

Temuan uji ini mengindikasikan nilai probabilitas *Breusch-Pagan* 0.1368, yang berada di atas tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian, model yang paling tepat dalam mengestimasi persamaan regresi adalah *Common Effect Model* (CEM). Dapat disimpulkan bahwa pendekatan model terbaik yang digunakan untuk menentukan Pengaruh pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Riau tahun 2021 hingga 2023 adalah *Common Effect Model* (CEM). Adapun hasil estimasi regresi menggunakan *Common Effect Model* (CEM) disajikan sebagai berikut:

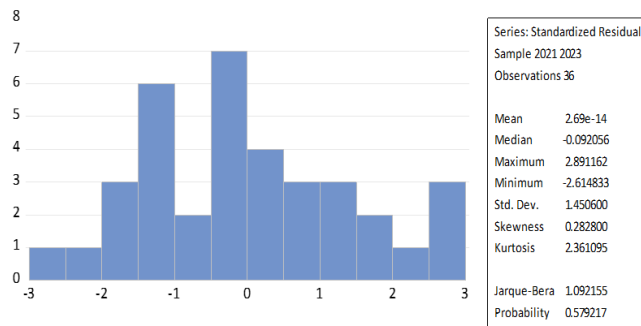
Tabel 5. Hasil Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.81584	20.13374	0.686203	0.4975
X1	32.06228	1.156511	27.72329	0.0000
X2	-30.76245	2.499634	-12.30678	0.0000
X3	0.766050	2.043279	0.374912	0.7102
Root MSE	1.430311	R-squared		0.972126
Mean dependent var	13.83778	Adjusted R-squared		0.969513
S.D. dependent var	8.688589	S.E. of regression		1.517074
Akaike info criterion	3.775883	Sum squared resid		73.64844
Schwarz criterion	3.951830	Log likelihood		-63.96590
Hannan-Quinn criter.	3.837293	F-statistic		372.0098
Durbin-Watson stat	1.244114	Prob(F-statistic)		0.000000

$$TKKD = 13.81584 + 32.06228 PAD - 30.76245 DP + 0.766050 BM + e_{it}$$

RESEARCH ARTICLE

Hasil estimasi model regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 13,81584 mengindikasikan bahwa ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berada pada nilai nol, maka tingkat kemandirian keuangan daerah diperkirakan sebesar 13,82. Hal ini menandakan bahwa terdapat faktor-faktor lain di luar model yang turut memengaruhi tingkat kemandirian fiskal daerah. Selanjutnya, koefisien regresi PAD tercatat positif sebesar 32,06228, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% pada PAD, dengan asumsi variabel lain tetap, akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 32,06%. Temuan ini memperkuat bukti bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah secara mandiri. Sebaliknya, Dana Perimbangan memiliki koefisien regresi negatif sebesar -30,76245, yang berarti bahwa peningkatan 1% dalam dana transfer justru menurunkan tingkat kemandirian keuangan sebesar 30,76%. Hal ini mencerminkan bahwa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat menjadi hambatan dalam pencapaian otonomi keuangan daerah. Adapun Belanja Modal menunjukkan koefisien positif sebesar 0,76605, mengindikasikan bahwa peningkatan 1% dalam belanja modal dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan sebesar 0,77%. Meskipun pengaruhnya relatif kecil dibandingkan PAD, belanja modal tetap memberikan kontribusi positif terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Hasil yang diperoleh dari yaitu nilai probabilitas sebesar 0,579217 > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.040558	6340.710	NA
X1	0.000134	2696.943	1.689513
X2	0.000625	14344.46	2.484095
X3	0.000418	8542.756	3.421898

Hasil pada tabel 6 hasil VIF (*Variance Inflation Factor*) antar variabel independent menunjukkan bahwa nilai tolerance nya kurang dari < 10 sehingga dapat dinyatakan tidak terjadinya multikolinieritas.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.892597	Prob. F(3,32)	0.4556
Obs*R-squared	2.779891	Prob. Chi-Square(3)	0.4268
Scaled explained SS	2.435299	Prob. Chi-Square(3)	0.4871

RESEARCH ARTICLE

Temuan uji heteroskedastisitas yang tercermin dalam nilai Chi-Square pada Tabel 7 menunjukkan probabilitas melebihi 0,05, sehingga dapat diasumsikan tidak terdapat indikasi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 8. Hasil Uji Autokolerasi

R-squared	0.042124	Mean dependent var	1.85E-16
Adjusted R-squared	-0.117522	S.D. dependent var	0.014510
S.E. of regression	0.015339	Akaike info criterion	-5.365848
Sum squared resid	0.007058	Schwarz criterion	-5.101929
Log likelihood	102.5853	Hannan-Quinn criter.	-5.273733
F-statistic	0.263858	Durbin-Watson stat	1.804508
Prob(F-statistic)	0.929253		

Berdasarkan informasi pada Tabel 8, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,804508. Angka ini kemudian dibandingkan dengan nilai batas atas (dU) dan batas bawah dari tabel Durbin-Watson pada tingkat signifikansi 5%, dengan jumlah data observasi sebanyak 36 dan tiga variabel bebas (k = 3). Dari perbandingan tersebut, diperoleh rentang $1,6539 < 1,804508 < 2,3461$ (yang merupakan hasil dari $4 - dU$). Karena nilai DW terletak di antara kedua batas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengindikasikan adanya autokorelasi.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.81584	20.13374	0.686203	0.4975
X1	32.06228	1.156511	27.72329	0.0000
X2	-30.76245	2.499634	-12.30678	0.0000
X3	0.766050	2.043279	0.374912	0.7102
Root MSE	1.430311	R-squared		0.972126
Mean dependent var	13.83778	Adjusted R-squared		0.969513
S.D. dependent var	8.688589	S.E. of regression		1.517074
Akaike info criterion	3.775883	Sum squared resid		73.64844
Schwarz criterion	3.951830	Log likelihood		-63.96590
Hannan-Quinn criter.	3.837293	F-statistic		372.0098
Durbin-Watson stat	1.244114	Prob(F-statistic)		0.000000

Pada Tabel 9, hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R-squared tercatat sebesar 0,969513. Artinya, sekitar 96% variasi dalam variabel dependen, yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang dianalisis, yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal. Sementara itu, sisanya sebesar 4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini.

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.81584	20.13374	0.686203	0.4975
X1	32.06228	1.156511	27.72329	0.0000
X2	-30.76245	2.499634	-12.30678	0.0000
X3	0.766050	2.043279	0.374912	0.7102
Root MSE	1.430311	R-squared		0.972126
Mean dependent var	13.83778	Adjusted R-squared		0.969513
S.D. dependent var	8.688589	S.E. of regression		1.517074
Akaike info criterion	3.775883	Sum squared resid		73.64844
Schwarz criterion	3.951830	Log likelihood		-63.96590
Hannan-Quinn criter.	3.837293	F-statistic		372.0098
Durbin-Watson stat	1.244114	Prob(F-statistic)		0.000000

RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan Tabel 10, nilai Fhitung sebesar 372,0098 dengan probabilitas 0,000000, yang lebih besar dari Ftabel sebesar 2,90112 pada tingkat signifikansi 0,05. Karena Fhitung > Ftabel dan $p < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) memiliki nilai t sebesar 27,72329 dengan $p = 0,0000 (< 0,05)$, sehingga H_1 diterima. Artinya, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Perimbangan (X_2) memiliki t sebesar -12,30678 dengan $p = 0,0000 (< 0,05)$, sehingga H_2 diterima. Hal ini menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemandirian keuangan. Sementara itu, Belanja Modal (X_3) menunjukkan nilai t sebesar 0,3749 dengan $p = 0,7102 (> 0,05)$, sehingga H_0 diterima. Artinya, variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t sebesar 27,72329 ($p < 0,05$), sehingga H_1 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD berperan penting dalam memperkuat kemandirian fiskal, karena semakin besar kontribusi PAD, semakin rendah ketergantungan daerah terhadap dana transfer. Hal ini mendukung prinsip desentralisasi fiskal, di mana PAD mencerminkan kapasitas daerah dalam pembiayaan mandiri. Secara praktis, penguatan PAD melalui optimalisasi potensi lokal, reformasi perpajakan daerah, dan efisiensi pengelolaan aset merupakan strategi penting untuk memperluas ruang fiskal dan meningkatkan kemandirian keuangan. Hasil ini sejalan dengan temuan Utami dan Narastri (2025), Frijunita *et al.* (2024), serta Nurvaliza dan Putra (2024), yang juga menunjukkan pengaruh signifikan PAD terhadap kemandirian daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dengan nilai t sebesar -12,30678 dan $p = 0,0000 (< 0,05)$, sehingga H_1 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat dapat melemahkan insentif daerah dalam menggali PAD, serta mencerminkan lemahnya kapasitas fiskal mandiri. Meskipun Dana Perimbangan dimaksudkan untuk pemerataan fiskal, ketergantungan berlebih menjadikan daerah pasif dan kurang inovatif dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks Provinsi Riau, tingginya alokasi dana transfer menunjukkan masih rendahnya optimalisasi potensi lokal.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan PAD, reformasi fiskal, dan perencanaan anggaran yang lebih mandiri. Hasil ini konsisten dengan temuan Machfud *et al.* (2021) yang juga menunjukkan pengaruh negatif Dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, Belanja Modal terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t sebesar 0,3749 dan nilai probabilitas sebesar 0,7102, yang melebihi batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol diterima. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun anggaran belanja modal meningkat, dampaknya belum terasa secara langsung terhadap peningkatan kemandirian fiskal di wilayah Provinsi Riau. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya antara lain sifat belanja modal yang cenderung berdampak dalam jangka panjang, tertundanya pelaksanaan proyek akibat pandemi COVID-19, serta distribusi anggaran yang belum sepenuhnya produktif atau tepat guna. Selain itu, keberhasilan belanja modal juga sangat bergantung pada kualitas perencanaan, pengawasan yang ketat, dan efektivitas implementasi dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan strategis dalam merancang belanja modal yang lebih fokus, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara langsung. Temuan ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Utami dan Narasti (2025), Rianto dan Heryanto (2025), serta Frijunita dan rekan (2024). Namun demikian, hasil ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya oleh Senapan (2021), Oktavia dan Handayani (2021), serta Bella (2022), yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan baik secara positif maupun negatif terhadap otonomi fiskal daerah. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 372,0098 dengan $p = 0,0000$, melebihi Ftabel sebesar 2,90112 pada taraf signifikansi 5%. Karena Fhitung > Ftabel dan $p < 0,05$, maka H_0 ditolak, yang berarti PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh

RESEARCH ARTICLE

signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Riau. Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara kolektif berkontribusi dalam menjelaskan variasi kemandirian fiskal daerah. Hasil ini menegaskan bahwa kemandirian keuangan merupakan hasil interaksi antara penerimaan asli daerah, dana transfer, dan pengeluaran pembangunan. Namun, signifikansi simultan tidak menjamin pengaruh masing-masing variabel secara individu, sehingga pengujian parsial tetap diperlukan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan fiskal daerah perlu mempertimbangkan ketiga komponen ini secara terpadu untuk mendorong kemandirian keuangan yang berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun anggaran 2021–2023, disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa ketergantungan pada dana transfer menghambat kemandirian fiskal. Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan, yang mengindikasikan bahwa alokasinya belum efektif dalam mendorong peningkatan PAD. Secara simultan, ketiga variabel PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan masukan dalam penyusunan artikel ini, khususnya kepada Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian.

7. Referensi

- Aisyah, R., & Susi, Y. (2016). Pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS terpadu di kelas VII SMP Negeri 1 Peudada. *Jurnal Pendidikan Almuslim*, 4(2), 1–6.
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis data panel dalam penelitian ekonomi dan bisnis (dilengkapi dengan penggunaan EViews)* (1st ed.). [Publisher tidak disebutkan dalam sumber asli; jika ada, tambahkan di sini].
- Bella, S. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(5), 675–683. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i5.562>.
- Fauzi, F., Dencik, A. B., & Asiati, D. I. (2019). *Metodologi penelitian untuk manajemen dan akuntansi: Aplikasi SPSS dan EViews untuk teknik analisis data*. Salemba Empat.
- Fauziyah, R. N. (n.d.). Pengertian otonomi daerah: Tujuan, prinsip, asas, dan landasan hukum. Gramedia Blog.
- Frijunita, S., Gurendrawati, E., & Utamingtyas, T. H. (2024). Pengaruh PAD, Tax Effort, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(2), 236-247. <https://doi.org/10.21009/japa.0502.02>.

RESEARCH ARTICLE

- Halim, A. (2023). Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah. *Kinerja: Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 8(2), 209–210. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v8i2.898>.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi keuangan daerah* (4th ed.). Salemba Empat.
- Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423>.
- Mahardika, E. P., & Fauzan. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017–2019). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 407–416.
- Nurliza Arpani, W., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373–2390. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218>.
- Nurvaliza, S., & Putra, G. H. (2024). Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 739–747.
- Oktavia, C., & Handayani, N. (2021). Pengaruh PAD, tax effort, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. <https://doi.org/10.21009/japa.0502.02>.
- Priyatno, D. (2022). *Olah data sendiri: Analisis regresi linier dengan SPSS dan analisis regresi data panel dengan EViews*. Cahaya Harapan.
- Ratmono, D. D., & Sholihin, M. (2017). *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual* (2nd ed.). UPP STIM YKPN.
- Rianto, & Heryanto. (2023). Pengaruh capital expenditure, special allocation fund, general allocation fund terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 47–57.
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 3(2), 298–314.
- Senapan, E. N. I. F., & Senapan, A. E. S. (2021). Pengaruh PAD, DAU, belanja modal, belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 61–69. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.228>.
- Subroto, V. K., & Endaryati, E. (2023). *Kumpulan teori akuntansi*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Alfabeta.

RESEARCH ARTICLE

Tempo. (2025, March 3). Fitra kritik defisit anggaran di Riau: Akibat ketergantungan transfer dana dari pusat. *Tempo*, 1.

Utami, S., & Narastri, M. (2025). The influence of regional original income, capital expenditure and employee expenditure on the tingkat kemandirian keuangan daerah in regencies/cities in East Java Province in 2020–2023. [*Nama Jurnal jika lengkap*], 2(1), 174–188.

Wasil, M., Putri, N. S., Larasati, A., & Mufida, N. (2020). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 99–109. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5441>.